

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**



**Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Tpl. (0265) 543004—Fax. (0265) 543006**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan, sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab meliputi administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat persidangan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2022


Sekretaris DPRD
Kabupaten Tasikmalaya
ASEP DARISMAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680101 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021.....	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022	14
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	63
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	65
3.3 Program dan Kegiatan	68
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	81
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2022	81

BAB V	:	PENUTUP.....	95
5.1		Kaidah-kaidah Pelaksanaan	95
5.2		Rencana tindak lanjut	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA	4
------------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya	49
Tabel 3.2	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya.....	62
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Daerah untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal yaitu :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan terjemahan dari tujuan, sasaran, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan merupakan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen guna mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat sangat strategisnya dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

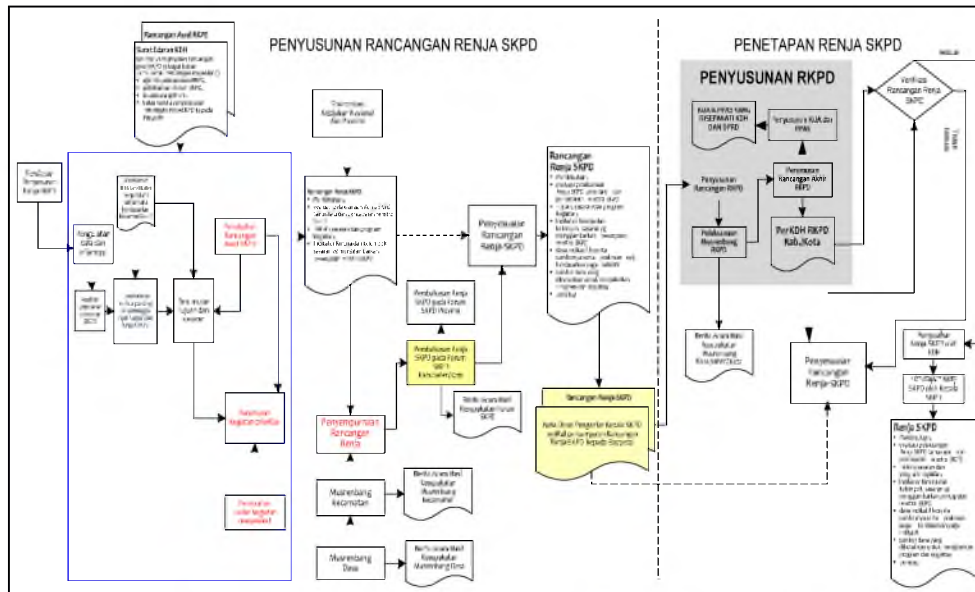
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis SKPD yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dijabarkan kedalam RKPD Kabupaten sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan

kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan DPA SKPD). Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA



Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan

- Lembaran Daerah Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi

- Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yaitu :

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program kegiatan dan sub kegiatan dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya dan perencanaan pembangunan provinsi jawa barat.
2. Sebagai pedoman perencanaan tahunan yang mengacu kepada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Sinkronisasi dan pelaksanaan dari hasil Musrenbang Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Fungsi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021), mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara

- Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan sebagai urusan penunjang pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2021 meliputi 2 Program, 16 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 57.726.278.859,- dan telah terserap anggaran sebesar Rp. 54.309.490.579,- atau (94,08%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 36.632.015.080,- telah terserap anggaran sebesar Rp. 35.736.358.999,- atau (97,55%), dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.094.957.779,- telah terserap anggaran sebesar Rp. 18.573.131.580,- atau (88,04%).

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 11.681.713.589,- terserap sebesar Rp. 10.379.205.733,- (88,85%) yang meliputi 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 64.620.000,- terserap sebesar Rp. 64.196.700,- (99,34%). *Output* : jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sedangkan *Outcome* : tercapainya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 20.540.000,- terserap sebesar Rp. 20.451.700,- (99,57%). *Output* : jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD. Sedangkan *Outcome* : meningkatnya kemampuan menyusun dokumen perencanaan tahunan dan dokumen penganggaran perangkat daerah.

b) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 19.540.000,- terserap sebesar Rp. 19.295.700,- (98,75%). *Output* : jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Sekretariat DPRD. Sedangkan *Outcome* : tercapainya penyusunan LAKIP, LPPD, Laporan

Bulanan dan Laporan Kinerja Triwulanan di Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.

- c)** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 24.540.000,- terserap sebesar Rp. 24.450.000,- (99,63%). Output : jumlah dokumen hasil evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD. Sedangkan Outcome : meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.
- 2)** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 5.845.532.914,- telah terserap dana sebesar Rp. 5.300.380.947,- (90,67%). Dengan bentuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Outcome : Terselenggarakannya administrasi keuangan perangkat daerah.
- 3)** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 82.850.000,- telah terserap dana sebesar Rp. 82.120.000,- (99,12%). Dengan bentuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. Output : Jumlah paket pakaian dinas. Sedangkan Outcome : terpenuhinya kebutuhan kelengkapan pakaian dinas beserta atribut.
- 4)** Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.985.041.850,- telah terserap sebesar Rp. 1.916.347.800,- (96,64%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 425.162.350,- terserap sebesar Rp. 385.578.095,- (90,69%). Output : jumlah paket peralatan dan

perlengkapan kantor. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.

- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 313.220.500,- terserap sebesar Rp. 303.261.400,- (96,82%). *Output* : Jumlah paket persediaan barang cetak dan penggandaan. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 125.227.000,- terserap sebesar Rp. 110.823.500,- (88,50%). *Output* : jumlah dokumen hasil persediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan. *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
- d) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 553.020.000,- terserap sebesar Rp. 552.900.805,- (99,98%). *Output* : Jumlah laporan fasilitasi Kegiatan Rapat-rapat DPRD dan Alat Kelengkapannya. *Outcome* : Terpenuhinya kebutuhan Jamuan Rapat-rapat dan tamu.
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Sebesar Rp. 568.412.000,- terserap sebesar Rp. 563.784.000,- (99,19%). *Output* : Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dan Sekretariat DPRD. *Outcome* : Terselenggarakannya kegiatan rapat

koordinasi dan konsultasi DPRD dan Sekretariat DPRD.

- 5)** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 695.915.000,- terserap sebesar Rp. 304.541.000,- (43,76%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 107.120.000,- terserap sebesar Rp. 106.692.000,- (99,60%). *Output* : Tersedianya jenis barang pengadaan mebel. *Outcome* : Terpenuhinya kebutuhan mebel.
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 588.795.000,- terserap sebesar Rp. 197.849.000,- (33.60%). *Output* : jumlah peralatan dan perlengkapan kantor. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
- 6)** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.721.489.000,- terserap sebesar Rp. 1.568.456.889,- (91,11). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 525.660.000,- terserap sebesar Rp. 406.720.289,- (77,37%). *Output* : jumlah laporan hasil belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Sedangkan *Outcome* : pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini sebesar

Rp. 1.195.829.400,- terserap sebesar Rp. 1.161.736.600,- (97,15%). *Output* : Jumlah laporan hasil penyediaan jasa Satuan Pengaman Kantor, Jasa kebersihan, Tenaga Pengemudi, Jasa Pelayanan Umum. *Outcome* : Terselenggaranya Aktivitas Pelayanan yang Aman, nyaman dan Lancar.

- 7)** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.286.264.825,- terserap sebesar Rp. 1.143.162.397,- (88,87%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 321.820.000,- terserap sebesar Rp. 214.177.000,- (66,55%). *Output* : terpenuhinya jumlah kendaraan perorangan dinas, atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Sedangkan *Outcome* : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 243.480.000,- terserap sebesar Rp. 215.252.947,- (88,41%). *Output* : Terpenuhinya jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Sedangkan *Outcome* : Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 75.700.000,- terserap sebesar Rp. 73.311.100,- (96,84%). Output : terpenuhinya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara. Outcome : Tercukupinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.
- d) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 426.395.225,- terserap sebesar Rp. 422.331.450,- (99,05%). Output : terpenuhinya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi. Outcome : Terpeliharanya Ruang Gedung Kantor dan Halamannya.
- e) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 218.869.600,- terserap sebesar Rp. 218.089.900,- (99,64%). Output : terpenuhinya jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharani dan direhabilitasi. Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,

dengan anggaran sebesar Rp. 46.044.565.270,- terserap sebesar Rp. 43.930.284.845,- (95,40%) dengan 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.722.850.304,- terserap

sebesar Rp. 2.084.012.200,- (76,54%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 356.310.000,- terserap sebesar Rp. 344.935.000,- (96,81%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Outcome : Tersusunnya Program Pembentukan Daerah, Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. Tasikmalaya, Terpenuhinya Kebutuhan akan Perencanaan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan.
- b) Pembahasan Rancangan Perda, dengan anggaran sebesar Rp. 1.666.380.000,- terserap sebesar Rp. 1.408.202.000,- (84,51%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Outcome : Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPRD, Konsultasi Panitia Khusus DPRD, Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD, Konsultasi Badan Anggaran DPRD, serta Tersedianya Narasumber
- c) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik, dengan anggaran sebesar Rp. 430.470.200,- terserap sebesar Rp. 330.875.200,- (76,86%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik. Outcome : Tersusunnya Naskah

Akademik/Keterangan dan Rancangan Perda Usul
Prakarsa DPRD.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan anggaran sebesar Rp. 710.597.000,- terserap sebesar Rp. 485.864.000,- (86,37%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS, dengan anggaran sebesar Rp. 172.363.000,- terserap sebesar Rp. 172.363.000,- (100%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dalam bentuk Nota Kesepakatan DPRD dan Eksekutif tentang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome : Terlaksanakannya Pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.
 - b) Pembahasan APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 177.760.000,- terserap sebesar Rp. 119.140.000,- (67.02%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD yang disertai dengan kegiatan Studi Komparatif dalam rangka menambah wawasan dan Referensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya. Outcome : terlaksanakannya pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - c) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 175.611.000,- terserap sebesar Rp. 175.611.000,- (100%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang disertai dengan Studi Komparatif dalam rangka menambah wawasan dan Referensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD dan Sekretariat

DPRD Kab. Tasikmalaya. Outcome : terlaksanakannya pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.435.758.000,- terserap sebesar Rp. 1.332.501.000,- (92,81%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 173.694.000,- terserap sebesar Rp. 159.184.000,- (91,65). Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Outcome : Terselenggaranya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang disertai dengan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah.

b) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan anggaran sebesar Rp. 313.724.000,- terserap sebesar Rp. 302.367.000,- (96,38%). Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur. Outcome : Terselenggaranya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang disertai dengan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah.

c) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp. 233.494.000,- terserap sebesar Rp. 209.065.000,- (89,54%). Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Outcome : Terselenggaranya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disertai dengan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah.

d) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dengan anggaran sebesar Rp. 235.616.000,- terserap sebesar Rp. 211.000.000,- (89,55%). Output : Sebagai Bahan Perbandingan dan Referensi dalam rangka menunjang kelancaran Tugas DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya.
Outcome : Terselenggaranya Kunjungan Kerja Komisi III DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah.

e) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 479.230.000,- terserap sebesar Rp. 450.885.000,- (94,09%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Outcome : Terlaksanakannya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disertai dengan kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.556.029.300,- terserap sebesar Rp. 3.460.405.508,- (97,31%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

a) Publikasi dan Dokumentasi Dewan, dengan anggaran sebesar Rp. 857.905.000,- terserap sebesar Rp. 827.192.590,- (96,42%). Output : Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan

- Dokumentasi DPRD. Outcome : Terlaksananya Kerjasama DPRD serta Terinformasikannya Kegiatan DPRD melalui Sarana dan Prasarana Penunjang.
- b) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 443.565.000,- terserap sebesar Rp. 433.245.000,- (99,93%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Outcome : Terwujudnya Komunikasi antara Anggota DPRD dan Masyarakat dengan Terpublikasinya Kegiatan Anggota DPRD Bidang Sosial dan Budaya.
 - c) Penyusunan Program Kerja DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 168.966.300,- terserap sebesar Rp. 165.010.000,- (97,66%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Kerja DPRD. Outcome : Terlaksanakannya Penyusunan Program Kerja DPRD.
 - d) Pendalaman Tugas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.085.593.000,- terserap sebesar Rp. 2.024.957.918,- (97,09%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Outcome : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan serta Pengalaman Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 3.454.117.500,- terserap sebesar Rp. 3.001.661.515,- (86,90%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Kunjungan Kerja Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- terserap sebesar Rp.

665.670.555,- (63,40%). Output : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja di 39 Kecamatan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Outcome : Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Tugas Kelembagaan di 39 Kecamatan di Wilayah Kab. Tasikmalaya.

b) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 134.422.500,- terserap sebesar Rp. 101.552.700,- (75,55%). Output : Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD melalui kegiatan 2 Kali Bimtek Penyusunan Pokir untuk 50 Orang Anggota DPRD Hasil Reses dan 3 Dokumen Pokir Hasil 3 Kali Pelaksanaan Reses. Outcome : Tersusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan baik.

c) Pelaksanaan Reses, dengan anggaran sebesar Rp. 2.269.695.000,- terserap sebesar Rp. 2.234.438.260,- (98,45%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses. Sedangkan *Outcome* : Terlaksananya Komunikasi dua Arah antara Legislatif dan Konstituen.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik, dengan anggaran sebesar Rp. 139.840.000,- terserap sebesar Rp. 109.320.000,- (78,18%). Dengan bentuk sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 139.840.000,- terserap sebesar Rp. 109.320.000,- (78,18%). Output : Jumlah dokumen hasil pengawasan / review peraturan DPRD tentang kode etik DPRD. Outcome : meningkatnya kinerja DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.438.960.000,- terserap sebesar Rp. 2.311.517.071,- (94,77%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.363.830.000,- terserap sebesar Rp. 1.287.930.000,- (94,43%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Outcome : Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah.
 - b) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dengan anggaran sebesar Rp. 773.010.000,- terserap sebesar Rp. 727.585.000,- (94,12%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD. Outcome : Terfasilitasinya Tugas Badan Musyawarah DPRD.
 - c) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 302.120.000,- terserap sebesar Rp. 296.002.071,- (97,98%). Output : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Outcome : terfasilitasinya pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 30.923.582.166,- terserap sebesar Rp. 30.552.224.552,- (98,80%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 30.496.722.166,- terserap sebesar Rp. 30.169.268.052,- (98,93%). Output : Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak

- Keuangan DPRD. Outcome : Terpenuhinya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 352.540.000,- terserap sebesar Rp. 339.760.000,- (96,37%). Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan. Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
 - c) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 74.320.000,- terserap sebesar Rp. 43.196.500,- (58,12 %). Output : Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up. Outcome : terpenuhinya pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD.
9. Layanan Administrasi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 662.831.000,- terserap sebesar Rp. 592.779.000,- (89,43%). Dengan bentuk sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Fasilitasi fraksi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 238.221.000,- terserap sebesar Rp. 228.849.000,- (96,07%). Output : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD. Outcome : Terfasilitasinya kegiatan Fraksi DPRD.
 - b) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 424.610.000,- terserap sebesar Rp. 363.930.000,- (85,71%). Output : Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Outcome : terlaksanakannya rapat-rapat paripurna DPRD.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.620.000,00	64.196.700,00	99,34
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.540.000,00	20.451.700,00	99,57
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.540.000,00	19.295.000,00	98,75
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.540.000,00	24.450.000,00	99,63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.845.532.914,00	5.300.380.947,00	90,67
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.845.532.914,00	5.300.380.947,00	90,67
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.850.000,00	82.120.000,00	99,12
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.850.000,00	82.120.000,00	99,12
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.985.041.850,00	1.916.347.800,00	96,54
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.162.350,00	385.578.095,00	90,69
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	313.220.500,00	303.261.400,00	96,82
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.227.000,00	110.823.500,00	88,50
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	553.020.000,00	552.900.805,00	99,98
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	568.412.000,00	563.784.000,00	99,19
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.915.000,00	304.541.000,00	43,76
12	Pengadaan Mebel	107.120.000,00	106.692.000,00	99,60
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	588.795.000,00	197.849.000,00	33,60
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.721.489.000,00	1.568.456.889,00	91,11

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.660.000,00	406.720.289,00	77,37
16	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	1.195.829.000,00	1.161.736.600,00	97,15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.264.825,00	1.143.162.397,00	88,87
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.820.000,00	214.177.000,00	66,55
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.480.000,00	215.252.947,00	88,41
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.700.000,00	73.311.100,00	96,84
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.395.225,00	422.331.450,00	99,05
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218.869.600,00	218.089.900,00	99,64
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.923.582.166,00	30.552.224.552,00	98,80
22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	352.540.000,00	339.760.000,00	96,37
23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	74.320.000,00	43.196.500,00	58,12
24	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.496.722.166,00	30.169.268.052,00	98,93
	Layanan Administrasi DPRD	662.831.000,00	592.779.000,00	89,43
25	Fasilitasi Fraksi DPRD	238.221.000,00	228.849.000,00	96,07
26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	424.610.000,00	363.930.000,00	85,71
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.458.152.104,00	12.785.281.294,00	88,43
27	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.722.850.304,00	2.084.012.200,00	76,54
28	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	356.310.000,00	344.935.000,00	96,81
29	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.666.380.000,00	1.408.202.000,00	84,51
30	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	430.470.200,00	330.875.200,00	76,86

31	Penyusunan Tata Tertib DPRD	269.690.104,00	-	-
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	710.597.000,00	485.864.000,00	68,37
32	Pembahasan KUA dan PPAS	172.363.000,00	172.363.000,00	100,00
33	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	184.863.000,00	18.750.000,00	10,14
34	Pembahasan APBD	177.760.000,00	119.140.000,00	67,02
35	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-
36	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	175.611.000,00	175.611.000,00	100,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.435.758.000,00	1.332.501.000,00	92,81
37	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	173.694.000,00	159.184.000,00	91,65
38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	313.724.000,00	302.367.000,00	96,38
39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	233.494.000,00	209.065.000,00	89,54
40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	235.616.000,00	211.000.000,00	89,55
41	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	479.230.000,00	450.885.000,00	94,09
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.556.029.300,00	3.460.405.508,00	97,31
42	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	2.085.593.000,00	2.024.957.918,00	97,09
43	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	857.905.000,00	827.192.590,00	96,42
44	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	443.565.000,00	443.245.000,00	99,93
45	Penyusunan Program Kerja DPRD	168.966.300,00	165.010.000,00	97,66
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.454.117.500,00	3.001.661.515,00	86,90
46	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.050.000.000,00	665.670.555,00	63,40
47	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	134.422.500,00	101.552.700,00	75,55
48	Pelaksanaan Reses	2.269.695.000,00	2.234.438.260,00	98,45
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	139.840.000,00	109.320.000,00	78,18
49	Pengawasan Kode Etik DPRD	139.840.000,00	109.320.000,00	78,18

	Fasilitasi Tugas DPRD	2.438.960.000,00	2.311.517.071,00	94,77
50	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.363.830.000,00	1.287.930.000,00	94,43
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	773.010.000,00	727.585.000,00	94,12
52	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	302.120.000,00	296.002.071,00	97,98
		57.726.278.859,00	54.309.490.579,00	94,08

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022 memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada, dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2021**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (s/d Tahun 2020)		Capaian/Terwujud Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Peris																Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
									I				II				III				IV							
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pemerintahan 13	Keptemadagn 050 - 3198	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah Daerah																										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	%	100	286.000.000	90,83	163.921.980	9,17	81.000.000	0,00	0	16,67	20.996.150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,67	20.996.150	107,50	184.918.130	21,50	0,85			
	Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	30.000.000	1,00	100,00	26.664.730	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	26.664.730	100,00	0,89		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	111.000.000	5,00	83,33	67.153.600	6,00	26.000.000	0	0	0	2,00	33,33	33,333	2.050.000	0,00	0	0	0	0	2,00	2.050.000	7,00	69.203.600	116,67	62,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pelaporan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD	dok	6 Dokumen, 3 Jenis Dokumen	30	65.000.000	24,00	80,00	34.166.000	8,00	25.000.000	0	0	0	2,00	6,67	25	8.287.500	0,00	0	0	0	2,00	8.287.500	26,00	42.453.500	86,67	65,31
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	100%	100	80.000.000	100,00	100,00	35.937.650	22,00	30.000.000	0	0	0	10,00	10,00	0	10.658.650	0,00	0	0	0	10,00	10.658.650	110,00	46.596.300	110,00	58,25
	Administrasi	Pemenuhan	Bulan	84	32.479.640.111	70,00	23.025.655.659	14,00	6.354.469.100	3	3,571	21,4286	1.025.496.608	5	5,96	86,71	2.459.779.282	0,00	0	0	8,00	3.485.275.890	78,00	26.510.931.549	92,86	81,67		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	84 Bulan	84	32.479.640.111	70,00	23.025.655.659	14,00	6.354.469.100	3	3,571	21,4286	1.025.496.608	5	5,96	86,71	2.459.779.282	0,00	0	0	8,00	3.485.275.890	78,00	26.510.931.549	92,86	81,67	
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	3.184.255.000	41,67	2.540.477.900	58,23	309.020.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41,67	2.540.477.900	41,67	80,29		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Altbud Kelengkapannya	Jenis	12 Bulan, 4 Jenis Pakaian dan 3 jenis Altbud Kelengkapannya	4	90.020.000	0,00	0,00	0	4,00	90.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bekerja Tugass dan Fungsi	Orang	15 Orang Peserta dalam 1 Tahun	90	3.074.235.000	75,00	83,33	2.540.477.900	15,00	219.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00	2.540.477.900	83,33	82,64		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	28.192.651.350	83,33	18.450.513.182	16,67	2.199.241.850	25,00	171.831.050	25,00	0	602.763.990	0,00	0	0	0	0	0	0	0	774.095.040	133,33	19.224.608.222	133,33	68,19	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terperuhnya Alat Tulis Kantor	Bulan	12 Bulan, 54 jenis Alat Tulis Kantor, 10 jenis kertas dan cover	72	930.663.500	60,00	83,33	821.791.830	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	821.791.830	83,33	88,30		
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan kantor	Terperuhnya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12 Bulan	72	1.697.681.350	60,00	83,33	1.020.209.603	12,00	489.582.350	3	4,167	25	27.491.850	3	4,167	25	127.781.940	0,00	0	0	6,00	155.273.790	66,00	1.175.483.393	91,67	69,24

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedia barang cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan Outcome : Tersedia barang-barang Cetak dan Penggandaan Dokumen- dokumen	Bulan	12 Bulan, 3 jenis kertas dan cover, 24 jenis Belanja Cetak	72	1.907.456.500	60,00	83,33	1.433.178.420	12,00	377.170.500	3	4,167	25	19.777.200	3	4,167	25	69.489.900	0,00	0	0	-	-	0	6,00	89.267.100	66,00	1.522.445.520	91,67	79,82	
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Penurunan Perundang-undangan	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Penurunan Perundang-undangan	Output : Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Outcome : Tersedia Sumber Informasi dan Referensi dari Buku-buku	Bulan	12 Bulan, Majalah/ Surat Kabar/ Buku	72	694.863.000	60,00	83,33	484.909.250	12,00	135.907.000	3	4,167	25	9.771.000	3	4,167	25	35.941.000	0,00	0	0	-	-	0	6,00	45.712.000	66,00	530.621.250	91,67	76,36	
- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Output : Terselenggaranya Kegiatan Rapat-rapat DPRD dan Alat Kelengkapan Outcome : Terperuhnya kebutuhan jaman Rapat- rapat dan Tamu	Bulan	12 Bulan	72	3.246.536.000	60,00	83,33	2.469.088.163	12,00	565.110.000	3	4,167	25	40.726.000	3	4,167	25	134.821.150	0,00	0	0	-	-	0	6,00	175.547.150	66,00	2.664.635.313	91,67	82,08	
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKRD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12 Bulan	72	19.715.451.000	60,00	83,33	12.201.335.916	12,00	631.492.000	3	4,167	25	73.565.000	3	4,167	25	234.730.000	0,00	0	0	-	-	0	6,00	308.295.000	66,00	12.509.630.916	91,67	63,45	
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	4.408.135.700	50,00		3.410.538.400	50,00	846.526.900	0,00								92.847.000	0,00			-	0,00	-	16,67	92.847.000	66,67	3.503.385.400	66,67	79,48	
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pengadaan Mebel	Tersedia Meubelair Kantor	Bulan	12 Bulan, 4 Jenis Barang Pengadaan	72	988.736.700	48,00	66,67	798.836.700	12,00	109.580.000	0	0	0	0	6	8,33	0	92.847.000	0,00	0	0	-	-	0	6,00	92.847.000	54,00	891.683.700	75,00	90,18	
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia Peralatan dan Mesin	Bulan	12 Bulan, 14 Jenis Barang Pengadaan	72	3.286.607.100	60,00	83,33	2.611.701.700	12,00	604.155.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	-	0	0,00	-	60,00	2.611.701.700	83,33	79,46
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia Bangunan Gedung Kantor	Paket	1 Paket Pekerjaan	1	132.791.900	0,00	0,00	0	1,00	132.791.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-	-	0	0,00	-	0,00	-	0,00	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	7.273.348.400	77,98		5.407.925.969	22,02	1.914.180.100	25,00								780.063.876	0,00			-	0,00	-	50,00	905.148.938	127,98	6.313.074.907	127,98	86,80	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Output : Berlangganan Telepon, Listrik dan Internet Outcome : Tersedia Sumber Informasi, Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan, 3 Fasilitas Layanan	72	2.820.100.000	60,00	83,33	1.826.531.570	12,00	532.200.000	3	4,2	25	103.085.062	3	4,17	25	186.656.073	0,00	0	0	-	-	0	6,00	289.741.135	66,00	2.116.272.705	91,67	75,04	
- Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Satuan Pengamanan Kantor, Jasa Kebersihan, Tenaga Pengemudi, Jasa Pelayanan Umum Lainnya	Bulan	12 Bulan	72	510.370.000	60,00	83,33	341.462.000	0,00	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00	0	0	-	-	0	0,00	-	60,00	341.462.000	83,33	66,90	
- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				72	841.587.500	36,00	50,00	574.369.199	0,00	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,00	0	0	-	-	0	0,00	-	36,00	574.369.199	50,00	68,25		
- Penyediaan Jasa Outsourcing				83	3.101.290.900	60,00	95,24	2.685.583.200	12,00	1.381.980.100	3	4,762	25	22.000.000	3	4,762	25	593.407.803	0,00	0	0	-	-	0	6,00	615.407.803	66,00	3.280.971.003	104,76	105,79		

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	-Penyusunan dan Revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Program Pembentukan Daerah, Terselenggaranya Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Terpenuhinya Kebutuhan dan Pemenuhan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Tahun	1 Tahun, 3 Kali Kunjungan Kerja	3	429.810.000	0,00	0,00	0	3,00	429.810.000	0	0	0	0	1	33,33	33,333	182.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	182.800.000	1,00	182.800.000	33,33	42,53
-Pe mbahasan Rancangan Peraturan Daerah	-Pe mbahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pemria Khusus DPRD, Kirsultasi Pembia Khusus DPRD, Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD, Kirsultasi Badan Anggaran DPRD, serta Tersedianya Naskah Akhir	Kali	4 kali, 2 Beaudel, 2 Rapatia, 5 Parus Masing Masing 1 Kali, 4 Parus Masing Masing 1 Kali	24	4.873.820.250	20,00	85,33	1.845.841.950	4,00	1.879.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00	1.845.841.950	85,33	37,87	
-Penyusunan Kajian Tentang Penghasilan dan Tunjangan Kesayahleran Serta Standar Bawa Belanja Penunjang Kegiatan DPRD	-Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terselenggaranya Kajian atas Peraturan Perundang-undangan dan atau Tentang Materi tertentu yang dibutuhkan	Kajian	5 Kajian	5	313.402.840	3,00	60,00	124.894.000	2,00	163.402.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	124.894.000	60,00	40	
	-Facilita Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Terselenggaranya Masalah Akademik/Keterangan dan Rancangan Perda Usul Prakarsa DPRD	Dok	6 Dokumen	6	497.480.200	0,00	0,00	0	6,00	497.480.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terselenggaranya Tugas Fungsi DPRD yang Terintegrasi, baik secara Ad ministrasi maupun Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dok	1 Dokumen	1	497.480.200	0,00	0,00	0	1,00	497.480.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pe mbahasan Kebijakan Anggaran		Tahun	1 Tahun	1	1.058.800.000	0,00	0	100,00	1.058.780.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	-Pe mbahasan KUA dan PPAS	Kesepakatan DPRD dan Basialat tentang KUA dan PPAS 2022	Kali	1 Tahun, 2 Dokumen, 1 Kali Kunjungan Kerja	1	212.720.000	0,00	0,00	0	1,00	212.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Dambahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kesepakatan DPRD dan Basialat tentang KUA dan PPAS Perubahan 2021	Kali	1 Tahun, 2 Dokumen, 1 Kali Kunjungan Kerja	1	212.720.000	0,00	0,00	0	1,00	212.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Pembahasan APBD	Peraturan Daerah tentang APBD 2022	Kali	1 Tahun, 1 Dokumen, 1 Kali Kunjungan Kerja	1	211.120.000	0,00	0,00	0	1,00	211.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Pembahasan APBD Perubahan	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021	Kali	1 Tahun, 1 Dokumen, 1 Kali Kunjungan Kerja	1	211.120.000	0,00	0,00	0	1,00	211.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Pe mbahasan Pertanggungjawaban APBD 2020	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2020	Kali	1 Tahun, 1 Dokumen, 1 Kali Kunjungan Kerja	1	211.120.000	0,00	0,00	0	1,00	211.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Tahun	1 Tahun	1	2.351.948.000	0,00	0	100,00	2.351.948.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	1.023.875.000	26,67	1.023.875.000	26,67	43,53

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kali	100		174.760.000	0,00	0	100,00	174.760.000	0,00							33,33			39.640.000	0,00					0,00		33,33	39.640.000	33,33	39.640.000	33,33	22,68	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Kali	1 Tahun, 3 Kali	3	174.760.000	0,00	0,00	0	3,00	174.760.000	0	0	0					1	33,33	33,33	39.640.000	0,00	0	0			1	39.640.000	1,00	39.640.000	33,33	22,68		
	Facilitas Tugas DPRD	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kali	100		45.002.837.950	49,57	34.760.836.946	50,43	2.489.190.000	8,33			389.090.000	36,11							1.215.166.000	0,00					0,00		44,44	1.604.246.000	94,02	36.365.082.946	94,02	80,81
- Koordinasi dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD	- Koordinasi dan Kegiatan Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD sebagai Tugas Kelembagaan ke Luar Daerah	Kali	1 Tahun, 4 Kali	4	3.066.450.000	4,00	50,00	1.685.976.000	4,00	1.380.474.000	1	12,5	25	389.090.000	1	12,50	25,00				769.560.000	0,00	0	0				2,00	1.158.640.000	6,00	2.844.616.000	75,00	92,77	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Facilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terfasilitasnya Tugas Badan Musyawarah	Kali	1 Tahun Dalam Daerah, Tempat Lain Dalam Provinsi, Tempat Lain di Luar Provinsi Jawa Barat	234	41.700.387.950	231,00	98,72	33.074.890.946	3,00	804.140.000	0	0	0					1	0,43	33,33	344.310.000	0,00	0	0				1,00	344.310.000	232,00	33.419.170.946	99,15	80,10	
	Facilitas Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasnya Tugas Pimpinan DPRD	bulan	12 Bulan	12	216.000.000	0,00	0,00	0	12,00	216.000.000	0	0	0					6	50	50,00	101.296.000	0,00	0	0				6,00	101.296.000	6,00	101.296.000	50,00	46,90	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100		25.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00							0,00						
- Penyediaan Jasa Kendaraan		Output Terselenggaranya Kebutuhan Akomodasi Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome Terakomodinya Kegiatan DPRD dan Sekelompok DPRD	Bulan	3 Bulan	3	25.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0								0	0	0	0				0	0,00					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100		1.841.475.000	4,00	100,00	1.753.675.000	0,00	0	0,00										0	0,00							4,00	1.753.675.000	4,00	95,23		
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Output Tersedianya kendaraan Dinas / Operasional Outcome Terperuhnya Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	4 Unit	4	1.841.475.000	4,00	100,00	1.753.675.000	0,00	0	0	0	0								0	0,00	0	0					4,00	1.753.675.000	100	95,23		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				100		335.368.000	100,00		175.837.300	0,00	0	0,00										0	0,00						100,00	175.837.300	100	52,43			
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Output Terselenggaranya Peraturan Perundang-undangan Outcome Terselenggaranya Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan	Kali	1 kali, 5 tahun	25	135.368.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0								0	0,00	0	0					0,00					
- Pelatihan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD		Output Pemenuhan Anggota DPRD Outcome Terselenggaranya proses Pelatihan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD	Kali	Terselenggaranya Pelatihan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD	1	200.000.000	1,00	100,00	175.837.300	0,00	0	0	0									0	0,00	0						1	175.837.300	100	87,92		
Program Pengembangan Budaya Bekerja dan Pembinaan Perputakaan				100		102.925.000	100,00		93.933.700	0,00	0	0										0	0,00						100,00	93.933.700	100	91,26			

0	0	0		-	0	0	0		-	0,00	0	0	-		0	0,00		-	1,00	93.933.700	100	91,26
---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	------	---	---	---	--	---	------	--	---	------	------------	-----	-------

- Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan		Output : Tersedianya buku-buku berbagai bidang ilmu pengetahuan Outcome: Terdapatnya Anggota DPRD yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan	paket	1 paket pengabdian buku ilmu pengetahuan	1	102.925.000	1,00	100,00	33.833.700	0,00	0
--	--	--	-------	--	---	-------------	------	--------	------------	------	---

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	36,80	55,08	65	66	
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	N/A	77,72	78,30	80,30	
2.	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	%	100	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Jika kita berbicara tentang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pada dasarnya kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan peran serta dan sumbangan SDM dalam suatu organisasi agar optimal dalam proses transformasi barang dan jasa, baik di sektor privat maupun sektor publik. Manajemen SDM bukanlah pekerjaan yang mudah, karena melibatkan investasi yang cukup besar dan pada umumnya berjangka panjang serta melalui 4 (empat) proses yang bersifat integral, yaitu seleksi, pendidikan dan latihan, evaluasi dan penggajian serta pengembangan. Keempat proses tersebut memiliki korelasi yang tinggi antara satu dengan yang lainnya.

Sama halnya dengan manajemen SDM pada umumnya, manajemen aparatur pemerintah yang bergerak di sektor publik juga bertujuan agar SDM aparatur dapat memberikan sumbangan yang optimal dalam menyelenggarakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitasnya, agar SDM aparatur mampu melaksanakan tugasnya secara optimal, baik itu peningkatan aspek intelektual, aspek manajerial maupun aspek perilaku. Kebijakan yang sangat perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur sehingga mampu bekerja maksimal dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan.

Hal ini berarti dalam menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus dapat meletakkan

pondasi yang kuat dengan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai asas *the right man on the right place and the right job* berdasarkan kompetensi jabatan, karena kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka pengembangan sumber daya aparatur yang memiliki kapabilitas, integritas dan berorientasi pada pencapaian hasil adalah merupakan hal yang sangat krusial. Sementara itu pemanfaatan teknologi informasi serta berbagai upaya peningkatan dan pengembangan pegawai merupakan alat yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD khususnya Pasal 1 bahwa Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pelayanan administratif kesekretariatan kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

b. Bagian Umum, membawahkan :

- Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- Sub. Bagian Rumah Tangga;
- Sub. Bagian Perlengkapan dan Aset.

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.

c. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :

- Sub. Bagian Hubungan Masyarakat & Keprotokolan;
- Sub. Bagian Persidangan;
- Sub. Bagian Risalah.

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan dan penyusunan bahan risalah, kegiatan persidangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, acara-acara kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pengaturan penerimaan tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jadwal kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah dan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :

- Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub. Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan, anggaran, kas dan perbendaharaan, pelaksanaan proses akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :

- Sub. Bagian Fasilitasi Legislasi;
- Sub. Bagian Analisa, Pengembangan & Dokumentasi Hukum

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan dan penyiapan bahan pembahasan dan penetapan produk hukum, pengaturan jadwal dan fasilitasi kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah